

**PEMUNGUTAN ROYALTI MUSIK SATU PINTU OLEH LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

Isyadhiya Rahmiasih¹ dan Dina W. Kariodimedjo²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dalam hal pemungutan royalti musik satu pintu serta perbandingan pemungutan royalti musik di Indonesia dengan di Jerman dan Singapura.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan dan juga wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi UUHC dalam hal pemungutan royalti musik satu pintu oleh LMKN dapat dilihat dari proses pemungutannya. Dimulai dari permohonan lisensi dari *user* kepada pemegang hak cipta, pencatatan lisensi oleh Menteri Hukum dan HAM, penghimpunan royalti, dan pendistribusiannya oleh LMKN, namun terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran *user* dalam membayar royalti, dan masih belum adanya pusat data lagu dan/atau musik yang dapat memudahkan dalam pemungutan royalti musik satu pintu. Adapun pemungutan royalti musik satu pintu juga diimplementasikan di Jerman dan Singapura, namun perbedaan dengan Indonesia yaitu masih belum adanya pusat data lagu dan/atau musik.

¹ Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**ONE DOOR MUSIC ROYALTIES COLLECTION BY NATIONAL
COLLECTIVE MANAGEMENT INSTITUTE BASED ON INDONESIA'S
COPYRIGHT ACT OF 2014**

By:

Isyadhiya Rahmiasih³ Dina W. Kariodimedjo⁴

ABSTRACT

This research aimed to determine and analyze the implementation of Copyright Act 2014 in one door music royalties collection by National Collective Management Institute (NCMI) and the comparisons of music royalties collection in Indonesia and in Germany and Singapore.

This research used normative juridical approach that was supported by interviews. The collection of data was also done by researching law material through literature study and interviews with various sources. This data was then analyzed qualitatively and summarized descriptively within this study.

The result of this research showed that the implementation of UUHC in the one door music royalties collection by NMCI could be seen from the collecting process, although there were some obstacles such as lack of user awareness on paying these royalties and the absence of a song and/or music database that could make collecting one door royalties an easier process. One door music royalties collection system is also implemented in other countries such as Germany or Singapore, but theirs are more sophisticated with a song and/or music database existing unlike Indonesia's.

³ Undergraduate Student of Business Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

⁴ Lecturer and Legal Writing Supervisor of Business Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.